



Strategi Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang dalam Menjaga Keberlanjutan Lahan dan Pangan

Angga Putra Tri Rezeki^{1*}, Aldri Frinaldi²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Padang, 25132, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 06/10/2024

Revised 29/10/2024

Accepted 30/10/2024

Abstract

This study analyzes the strategies that have been implemented by the Local Government of Padang Panjang City to maintain land sustainability and food security amid the challenges of converting agricultural land to non-agricultural uses. The reduction in agricultural land area in Padang Panjang City from 805 hectares in 2018 to 654 hectares in 2023 has resulted in a decline in local food production, making the city increasingly dependent on food supplies from other regions. This research employs a descriptive qualitative approach, where data is collected through in-depth interviews and documentary studies. The results indicate that the Padang Panjang City Government has implemented various strategies, including the strategy of establishing sustainable agricultural land, increasing food production, educating on the use of technology in agriculture, and promoting agricultural land as a tourist village. However, several challenges remain, such as the lack of community awareness regarding the importance of land sustainability, limited land that can be allocated for agriculture, and insufficient coordination in policy implementation. This study provides recommendations to enhance policy effectiveness and cooperation between the government and the community to maintain land sustainability and food security in Padang Panjang City.

Keywords: *Land Sustainability, Food Security, Land Conversion, Local Government Strategy*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi yang telah diimplementasikan oleh Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang dalam menjaga keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan di tengah tantangan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Penurunan luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang dari 805 hektare pada tahun 2018 menjadi 654 hektare pada tahun 2023 telah mengakibatkan penurunan produksi pangan lokal, yang membuat kota ini semakin bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah menerapkan berbagai strategi, antara lain strategi penetapan lahan berkelanjutan, strategi peningkatan produksi pangan, strategi edukasi pemakaian teknologi di bidang pertanian, serta strategi edukasi lahan menjadi desa wisata. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lahan, keterbatasan lahan yang dapat dialokasikan untuk pertanian, serta kurangnya koordinasi dalam implementasi kebijakan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna menjaga keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan di Kota Padang Panjang.



Kata Kunci: Keberlanjutan Lahan, Ketahanan Pangan, Alih Fungsi Lahan, Strategi Pemerintahan Daerah

*Penulis Korespondensi

E-mail : trianggaputra11@gmail.com

PENDAHULUAN

Kota Padang Panjang, yang terletak di Sumatera Barat, merupakan salah satu daerah agraris di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, tantangan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan urbanisasi dan industrialisasi. Di tingkat global, isu keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan telah menjadi perhatian serius, terutama karena perubahan iklim, degradasi lahan, dan pertumbuhan populasi yang meningkatkan tekanan terhadap sistem pangan dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat bahwa laju kehilangan lahan pertanian akibat urbanisasi dan perubahan iklim berdampak pada kapasitas produksi pangan di berbagai negara. Hal ini mengancam ketahanan pangan global yang juga berdampak pada ketergantungan antarnegara untuk suplai pangan. Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan serupa, dengan alih fungsi lahan pertanian yang sering kali terjadi untuk keperluan pemukiman dan industri, yang mengancam ketahanan pangan dalam negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, Indonesia mengalami konversi lahan pertanian yang terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya untuk melindungi lahan pertanian. Menurut Paolo Tarolli (2020),

keberlanjutan lahan melibatkan tiga aspek utama: ekonomi, ekologi, dan sosial. Pada aspek ekonomi, upaya keberlanjutan bertujuan untuk meminimalkan biaya produksi, sementara aspek ekologi menekankan pentingnya menjaga lingkungan alam dan kualitas sumber daya. Aspek sosial mencakup perlindungan hak dan kesejahteraan petani. Di samping itu, ketahanan pangan menurut FAO meliputi empat pilar: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Ketahanan pangan terjadi ketika setiap orang memiliki akses yang berkelanjutan terhadap pangan yang mencukupi untuk hidup sehat dan aktif. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan industri telah menjadi salah satu isu krusial yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian di daerah ini (Azman, 2013). Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang melalui Bapak Fitriadi S.Pt, selaku Kepala Bidang Lahan dan Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, pada hari Kamis, 1 Agustus 2024, beliau menjelaskan:

"...Jenis pangan yang rawan di mana ketersediaannya terbatas dan perlu bantuan suplai dari daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu 1. Padi, 2. Jagung, 3. Kedelai, 4. Kacang tanah, 5. Kacang hijau, 6. Ubi kayu, 7. Ubi jalar-Umbi Basah. Hal ini disebabkan oleh luas lahan di Kota Padang Panjang yang hanya sebesar 2.300 Ha. Meskipun sudah kita tetapkan daerah pertanian berkelanjutan dan tidak boleh

adanya pembangunan rumah, aktivitas industri, atau pembangunan yang lain tetap saja Kota Padang Panjang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, dan beberapa jenis pangan yang saya sebutkan tadi itu adalah jenis pangan yang kita masih bergantung pada Kabupaten Tanah Datar."

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang telah menurun dari 805 hektare pada tahun 2018 menjadi 654 hektare pada tahun 2023, yang menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kapasitas produksi pangan lokal (BPS, 2023).

Keberadaan lahan pertanian yang cukup sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan suatu daerah. Penurunan luas lahan pertanian tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan petani dan masyarakat setempat. Ketergantungan pada pasokan pangan dari daerah lain semakin meningkat, yang dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan pasokan pangan jika terjadi gangguan dalam distribusi (Monsaputra, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dari pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan lahan dan memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengembangkan sejumlah strategi untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk penetapan lahan pertanian berkelanjutan, peningkatan produksi pangan, edukasi tentang pemakaian teknologi di bidang pertanian, dan pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Namun, implementasi strategi tersebut tidak lepas dari

berbagai kendala. Beberapa faktor penghambat, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lahan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, seringkali menghambat efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan (Noer, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengatasi alih fungsi lahan, dengan fokus pada langkah-langkah konkret dan pendekatan yang diambil untuk mempertahankan integritas ruang terbuka dan lahan pertanian;
- 2) Mengevaluasi dampak dari alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan lokal, dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi ketersediaan serta aksesibilitas pangan bagi masyarakat;
- 3) Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan lahan serta meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dan potensi sumber daya alam yang ada.

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan terkait alih fungsi lahan dan ketahanan pangan di Kota Padang Panjang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendalami dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Kota

Padang Panjang dalam menjaga keberlanjutan lahan dan pangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian dilakukan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan fokus pada Dinas Pangan dan Pertanian serta pihak-pihak terkait lainnya yang berperan dalam pengelolaan lahan dan ketahanan pangan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan topik penelitian. Informan terdiri dari pejabat Dinas Pangan dan Pertanian, petani, anggota masyarakat yang terlibat dalam pengembangan desa wisata, serta pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan lahan dan ketahanan pangan.

Tabel 1. Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Bapak Fitriadi M. S.Pt	Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan
Ibuk Lidya R. SP	Subkor Sarana dan Prasarana Pertanian
Ibuk Erita Ejenti Amd	Penyuluh Pertanian
Ibuk Riri Dwi Safitri S.TP	Staf Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Ibuk Syamsuniar SP	Staf Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Bapak Andi	Petani
Ririn	Pengelola Desa Wisata Kubu Gadang
Bapak Rahmat	Anggota Komunitas Pertanian di Kota Padang Panjang
Ibuk Riska	Petani
Bapak Saiful	Petani

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara bersifat semi-terstruktur, memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan mereka secara bebas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, reduksi data, di mana data yang diperoleh diseleksi dan disusun untuk mengidentifikasi pola dan tema; kedua, penyajian data dalam bentuk naratif, yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dan makna data; ketiga, penarikan kesimpulan yang mengaitkan temuan dengan pertanyaan penelitian. Untuk meningkatkan keabsahan data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, sehingga memastikan konsistensi dan kredibilitas data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi besar dalam menjaga keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan, meskipun menghadapi tantangan dari laju urbanisasi yang cepat. Dalam rangka memahami strategi pemerintahan daerah terkait, beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan meliputi data demografi, luas lahan, penggunaan lahan, dan potensi sektor pertanian. Berikut adalah penjelasan terkait temuan tersebut:

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah sekitar 23,00 km². Meskipun termasuk kota kecil, kepadatan penduduknya cukup tinggi

dengan jumlah penduduk mencapai 55.000 jiwa. Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap penggunaan lahan untuk pemukiman dan pembangunan infrastruktur, terutama dalam menghadapi kebutuhan ruang yang semakin meningkat. Selain itu, terbatasnya lahan hijau juga menambah tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara perkembangan kota dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang yang efektif menjadi semakin penting untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dan mencegah degradasi lingkungan.

Tabel 2. Ketersediaan Lahan di Kota Padang Panjang

Indikator	Data
Luas wilayah	23,00 km ²
Populasi penduduk	55.000 jiwa
Kepadatan penduduk	2.391 jiwa/km ²

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan lahan untuk pertanian di Kota Padang Panjang semakin terbatas, sehingga diperlukan strategi tata ruang yang cermat agar penggunaan lahan tetap efisien dan berkelanjutan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang (2018 - 2023)

Tahun	Jumlah Penduduk
2018	54200
2019	54700
2020	55150
2021	55300
2022	55600
2023	56015

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023

Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Keberlanjutan Lahan dan Pangan

1) Penetapan Lahan Berkelanjutan: Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang jelas mengenai perlindungan lahan pertanian melalui Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk menjaga agar lahan tetap digunakan untuk pertanian dan melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lahan. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2023), kebijakan pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam. Berdasarkan wawancara peneliti di lapangan dengan Bapak Andi, seorang petani di Kota Padang Panjang, beliau menjelaskan:

“ . . . Ya, kami para petani dikumpulkan lalu diberikan sosialisasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang agar kami bersama-sama dengan pemerintah menjaga keberlanjutan lahan dan pangan. Edukasi yang diberikan oleh Dinas Pangan dan Pertanian ini sangat bermanfaat bagi kami, karena untuk menjadi petani yang sukses tentu butuh arahan dan masukan dari pemerintah.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful, petani lainnya di Kota Padang Panjang, beliau menerangkan:

“ . . . Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang

Panjang menyampaikan kepada kami bahwa mereka akan mendukung segala bentuk aktivitas pertanian yang akan kami lakukan. Kami diberikan edukasi agar tidak menjual lahan kepada pihak lain. Lalu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang juga mengingatkan kami agar tidak mudah tergiur dengan uang ratusan juta bahkan miliaran jika ada pihak lain yang ingin membeli lahan kami."

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah Kota Padang Panjang dalam menjaga keberlanjutan lahan dan pangan adalah melalui penetapan lahan berkelanjutan. Masyarakat diberikan sosialisasi agar bersama-sama berkomitmen menjaga lahan tersebut agar tetap berfungsi sebagai lahan pertanian. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengingatkan kepada masyarakat yang lahannya telah ditetapkan sebagai lahan pertanian agar tidak mudah tergiur dengan tawaran uang ratusan juta atau miliaran sehingga memutuskan untuk menjual lahannya.

2) Peningkatan Produksi Pangan: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang juga berfokus pada peningkatan produksi pangan dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, serta dukungan pemantauan dari penyuluh untuk memastikan kebutuhan pertanian terpenuhi. Hasil wawancara dengan Bapak Fitriadi, Kabid Tanaman Pangan, menunjukkan bahwa penggunaan alat modern telah membantu meningkatkan hasil pertanian. Hadi dan Salim (2019) menjelaskan bahwa inovasi teknologi pertanian, seperti

penggunaan alat pertanian modern, dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pangan.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung segala bentuk aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya diberikan melalui ucapan namun Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang memberikan bantuan alat-alat pertanian seperti lat dan mesin budidaya pertanian, dan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian yang diberikan kepada petani yang lahannya sudah ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan.

Selama periode 2018 hingga 2023, Kota Padang Panjang telah menerima berbagai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mendukung sektor pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang saya temukan, berikut beberapa jenis alat pertanian yang diberikan selama periode tersebut:

- a. Traktor Tangan (Hand Tractor): Traktor tangan dapat digunakan untuk lahan yang luas dan membantu mengurangi waktu pengolahan tanah.
- b. Pompa Air : Pompa air disediakan untuk mendukung sistem irigasi, terutama di wilayah yang membutuhkan pengelolaan air secara lebih intensif, seperti lahan sawah.
- c. Alat Tanam Jagung dan Padi : Mesin tanam otomatis ini diberikan untuk meningkatkan efisiensi penanaman, baik untuk jagung maupun padi, yang menjadi komoditas utama di beberapa wilayah pertanian di Padang Panjang.
- d. Alat Penyemprot Pupuk dan Pestisida (Sprayer): Alat ini

diberikan untuk membantu petani dalam penyemprotan pupuk cair maupun pestisida. Dengan adanya alat ini, petani dapat mengontrol hama dan penyakit dengan lebih mudah dan efisien.



Gambar 1. Penyerahan Alat-Alat Pertanian kepada Ketua Kelompok Tani oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang

3) Edukasi pemakaian teknologi di bidang pertanian:

Kota Padang Panjang memiliki keterbatasan luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, hanya sekitar 60% dari total 2.300 hektar. Sebagian besar lahan tidak produktif karena berada di kawasan hutan lindung atau daerah dengan kemiringan yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah fokus pada peningkatan produktivitas lahan yang tersisa melalui strategi edukasi pemakaian teknologi pertanian.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian dengan memperkenalkan teknologi modern kepada para petani, mengingat bahwa banyak petani masih bergantung pada metode tradisional yang kurang optimal. Pemerintah melaksanakan program edukasi untuk petani terkait teknologi pertanian modern. Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Riri, staf Dinas Pangan, pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petani dalam menggunakan alat-alat pertanian modern dan praktik terbaik.

Putri dan Prasetyo (2022) menyoroti bahwa edukasi masyarakat tentang pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga ketahanan pangan.

Tabel 4. Data Penyuluhan dan Edukasi Teknologi Pertanian di Kota Padang Panjang

Indikator	Data
Jumlah Balai Penyuluh Pertanian	2 (di Kecamatan Ganting dan Silayiang)
Jumlah Penyuluh Lapangan	13 orang penyuluh untuk 16 kelurahan
Jumlah Kelompok Tani	149 kelompok tani
Teknologi yang Diperkenalkan	Traktor, alat penggilingan padi, sensor tanah, irigasi tetes
Jenis Pelatihan	Teknologi alat pertanian, pengendalian hama, penggunaan pupuk

Sumber: Hasil wawancara dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang (data internal kelompok tani), 2024

Hasil dari strategi edukasi ini telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian, meskipun keterbatasan lahan masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, berikut adalah beberapa dampak yang telah tercapai:

Tabel 5. Dampak Penerapan Teknologi Pertanian di Kota Padang Panjang

Indikator	Data
Peningkatan hasil panen padi	15% lebih tinggi setelah

Indikator	Data
	penggunaan traktor dan irigasi
Pengurangan biaya produksi	10% setelah penggunaan alat penggilingan padi
Pengurangan gagal panen	5% berkurang setelah pelatihan pengendalian hama

Sumber: Data yang dihimpun dari laporan tahunan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang (terkait hasil produksi pertanian setelah penerapan teknologi alsintan), 2023

4) Edukasi lahan menjadi desa wisata
 Strategi edukasi lahan menjadi desa wisata merupakan upaya pemerintah daerah Kota Padang Panjang untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan sekaligus mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini dilakukan sebagai alternatif agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan menjadi perumahan atau industri, tetapi justru dikelola secara produktif dan dikombinasikan dengan potensi wisata, khususnya agrowisata. Desa Kubu Gadang menjadi salah satu contoh sukses dari strategi ini.

Kota Padang Panjang juga mengembangkan potensi agrowisata sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan lahan. Program ini memungkinkan lahan pertanian untuk digunakan sebagai destinasi wisata yang edukatif dan berkelanjutan. Dewi dan Widodo (2022) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berbasis komunitas merupakan salah satu solusi efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Tabel 6. Jenis Wisata dan Aktivitas di Desa Wisata Kubu Gadang

Jenis Wisata	Aktivitas
Wisata Edukasi	Menanam padi, menangkap ikan, belajar membuat pupuik batang padi, belajar silat, belajar alat musik tradisional
Wisata Budaya	Tari penyambutan, makan sesuai adat Minangkabau, petatah petitih, atraksi manatiang, pertunjukan tari kreasi
Wisata Alam	Sensasi mandi hujan dengan pemadam kebakaran, trekking ke sawah dan kebun, wisata sapi perah
Wisata Kuliner	Mencoba memasak rendang, wisata kuliner tradisional, edukasi kuliner

Sumber: Wawancara dengan Pengelola Desa Kubu Gadang, 2024

Desa Kubu Gadang yang dijadikan desa wisata membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Lahan pertanian yang ada kini dikelola secara berkelanjutan melalui agrowisata, memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengorbankan fungsi produktifnya. Selain itu, penduduk lokal yang terlibat dalam kegiatan agrowisata, seperti pemandu wisata, pengelola penginapan, dan petani, memperoleh penghasilan tambahan. Pada tahun 2022, tercatat peningkatan pendapatan masyarakat Desa Kubu Gadang sebesar 25% setelah pengembangan desa wisata ini. Desa wisata juga berfungsi sebagai sarana edukasi, di mana wisatawan dapat belajar tentang pertanian tradisional dan modern, sementara petani lokal mendapat edukasi untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan keterampilan pertanian mereka.

Analisis Implementasi Strategi

Meskipun berbagai strategi telah diimplementasikan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang signifikan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi. Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki anggaran terbatas, di mana sekitar 60% dari total anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga hanya 40% yang dapat digunakan untuk pemberdayaan sektor pertanian. Rahman dan Alamsyah (2020) mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan berperan besar dalam menentukan ketahanan pangan di daerah perkotaan

Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan petani, terlihat bahwa komunikasi antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan masyarakat kurang efektif. Petani mengeluhkan lambatnya respons pemerintah terhadap masalah yang dihadapi, seperti aliran air irigasi yang tersumbat. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam komunikasi dan tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi. Yulianto dan Purnama (2021) menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan harus terintegrasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan

Tantangan Keterlibatan Generasi Muda

Satu lagi tantangan yang dihadapi adalah rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dalam sektor pertanian. Banyak petani yang sudah berusia lanjut, dan generasi

muda cenderung lebih memilih pekerjaan di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan. Ini menjadi perhatian serius karena regenerasi petani sangat penting untuk keberlanjutan pertanian di Kota Padang Panjang. Lestari dan Sutrisno (2023) mencatat bahwa peran pemuda dalam pertanian berkelanjutan sangat krusial, karena mereka dapat membawa inovasi dan praktik baru yang lebih efisien.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan di Kota Padang Panjang memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Penetapan regulasi yang lebih ketat mengenai alih fungsi lahan, peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian, serta peningkatan komunikasi dan partisipasi masyarakat menjadi langkah-langkah yang harus diprioritaskan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang dalam menjaga keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan, serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengimplementasikan beberapa strategi kunci, termasuk penetapan lahan berkelanjutan, peningkatan produksi pangan, edukasi mengenai teknologi pertanian, dan pengembangan agrowisata.

Namun, keberhasilan strategi-strategi ini masih terhambat oleh beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya

komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta rendahnya minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam sektor pertanian.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan, diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi, termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan program yang menarik bagi generasi muda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan di Kota Padang Panjang.

REFERENSI

- Azman, H. (2013). Strategi Perlindungan Lahan Pertanian di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pertanian.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Data Statistik Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2023.
- Monsaputra, R. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Ketahanan Pangan di Padang Panjang. *Jurnal Agraria*, 11(2), 55-67.
- Noer, F. (2016). Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Renstra Kota Padang Panjang (2018). Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2018-2023.
- Fitriadi, S. (2024). Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
- Dewi, R. S., & Widodo, S. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas untuk Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 15(1), 45-59.
- Sari, I. P., & Kurniawati, A. (2021). Strategi Pertanian Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 12(2), 67-78.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Panduan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Rahman, A., & Alamsyah, F. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Daerah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(3), 25-36.
- Hadi, Y., & Salim, A. (2019). Inovasi Teknologi Pertanian dalam Meningkatkan Produksi Pangan Lokal. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 14(4), 112-121.
- Putri, D. F., & Prasetyo, A. (2022). Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 11(1), 89-99.
- Lestari, R. A., & Sutrisno, E. (2023). Peran Pemuda dalam Pertanian Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pemuda dan Pembangunan*, 6(2), 44-57.
- Mulyana, A., & Gunawan, D. (2018). Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia: Tinjauan Literatur. *Jurnal Perubahan Iklim*, 7(1), 33-49.
- Setiawan, B. A., & Suryani, E. (2017). Model Pertanian Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 10(3), 99-

108.
Yulianto, R. H., & Purnama, D. (2021).
Peran Pemerintah dalam Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 77-85.